

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan jumlah penduduk adalah fenomena global yang bersifat terus – menerus dan tidak dihindari sepanjang waktu. *World Population Review (2023)* mencatat bahwa populasi dunia telah mencapai 8,2 miliar jiwa. Dalam konteks global, Indonesia berada di urutan keempat berdasarkan jumlah penduduk, di belakang India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Populasi nasional diperkirakan mencapai 282,4 juta jiwa pada 2024 dengan pertumbuhan sekitar 1 persen per tahun (Tuwu and La Tarifu 2023). Angka ini diperkirakan terus meningkat hingga pada tahun 2045 populasi Indonesia diproyeksikan melebihi 320 juta jiwa.

Pada perayaan 100 tahun kemerdekaan yang menandai era Indonesia Emas, pemerintah mencanangkan visi ambisius untuk menjadi negara maju dan sejahtera (Badan Pusat Statistik 2023). Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyusun agenda transformasi Indonesia Emas 2045. Salah satu agenda utamanya adalah transformasi sosial dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup manusia sepanjang siklus kehidupannya. Arah kebijakan ini memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagaimana diatur pada Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945.

Pembangunan nasional membutuhkan keterlibatan aktif dari pemerintah dan masyarakat agar dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara sistematis, terarah, menyeluruh, dan responsif terhadap dinamika perubahan. Tanggung jawab tersebut berada pada pemerintah yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi atas kebijakan pembangunan. Pada dasarnya, pemerintah memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Sembodo 2021). Berbagai program dan kebijakan telah digulirkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh, termasuk bagi

kelompok lanjut usia. Terkait hal ini, Wahyudi (2008) menjelaskan bahwa lanjut usia merupakan fase dalam perjalanan hidup manusia yang ditandai dengan proses penuaan (*aging process*) dan menjadi siklus akhir yang pasti dialami setiap individu (Leni 2020). Sejalan dengan itu, *World Health Organization* (WHO) menggolongkan seseorang berusia 60 tahun ke atas sebagai kelompok lanjut usia, di mana pada tahap ini individu mulai mengalami perubahan fisik dan psikologis yang berpengaruh terhadap kualitas hidupnya.

Lebih jauh lagi, WHO tidak hanya menggolongkan lansia, yang didefinisikan sebagai orang dengan usia 60 tahun ke atas, tetapi juga membagi kategori berdasarkan rentang usia, mulai dari usia lanjut awal (60–74 tahun), lanjut usia tua (75–90 tahun), hingga usia sangat tua (90 tahun ke atas). Pembagian ini penting untuk menunjukkan adanya perbedaan kebutuhan dan tantangan pada tiap kelompok lansia. Sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan masyarakat, pemerintah sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan kebijakan, terutama dalam konteks bonus demografi yang sedang berlangsung (Cicih and Agung 2022). Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan masa bonus demografi akan mencapai puncaknya pada periode 2020 hingga 2035. Situasi ini terlihat dari meningkatnya jumlah penduduk usia produktif (15–60 tahun) yang besarnya hampir dua kali lipat dibandingkan kelompok usia anak (0–14 tahun) maupun lansia (60 tahun ke atas). Kondisi tersebut memberikan potensi besar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi, namun juga menuntut perencanaan dan strategi yang tepat agar peluang tersebut dapat dimaksimalkan secara efektif. Namun, seiring berjalannya waktu, bonus demografi akan bergeser pada dinamika baru berupa meningkatnya proporsi penduduk usia non-produktif, khususnya kelompok lansia (Hakim 2020). Situasi ini akan menghadirkan tantangan yang semakin kompleks, terutama terkait dengan fenomena penuaan penduduk (*ageing population*).

Fenomena *ageing population* merupakan proses demografi yang tidak dapat dihindari, ditandai dengan peningkatan signifikan jumlah maupun proporsi penduduk lanjut usia (Budiono and Rivai 2021). Memasuki fase ini membawa tantangan besar, baik bagi lansia, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Di

antara berbagai tantangan yang ada, menjaga kualitas hidup menjadi salah satu fokus utama, mengingat penurunan kapabilitas fisik, ekonomi, psikologis, dan sosial kerap menyertai bertambahnya usia (Daryanto, Agustin, and Pongtuluran 2023). Kondisi fisik yang melemah membuat lansia lebih rentan terhadap berbagai penyakit, sementara keterbatasan dukungan sosial terutama di daerah terpencil menyebabkan mereka menghadapi persoalan psikososial seperti kesepian dan isolasi sosial. Rasa kesepian terbukti menjadi salah satu faktor penting yang dapat menurunkan kualitas hidup lansia (Kartika, Barmawi, and Yuningsih 2024). Permasalahan ini lebih disebabkan oleh minimnya interaksi sosial ketimbang sekadar faktor tinggal sendiri. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas hidup lansia perlu diarahkan pada penguatan partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan sosial.

Kegiatan sosial merupakan aktivitas yang mencakup proses hubungan dan interaksi antara individu maupun di masyarakat dengan tujuan mempererat hubungan sosial, berbagi pengalaman, serta memberikan manfaat bagi anggota masyarakat (Tirtariandi et al. 2023). Bagi lansia, kegiatan sosial dirancang untuk meningkatkan keterlibatan mereka, baik dengan sesama lansia maupun dengan generasi lain, sehingga dapat membantu mencegah dampak negatif penuaan seperti penurunan kesehatan fisik, kehilangan kemandirian, maupun munculnya masalah psikososial. Hal ini selaras ketentuan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 mengenai Kesejahteraan Lanjut Usia, yang menekankan pentingnya pemberdayaan lansia agar tetap dapat berkontribusi dalam pembangunan sesuai pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta kondisi fisik yang dimiliki, sekaligus memastikan terpeliharanya kesejahteraan sosial lansia secara optimal.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, di Indonesia memiliki sejumlah provinsi yang mencatatkan jumlah penduduk lansia dalam bentuk persentase, sebagaimana yang tertera dalam tabel 1.1 di bawah ini :

**Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Kelompok Tahun 2023**

Provinsi	Kelompok Umur		Total
	< 60 Tahun	> 60 Tahun	
DI Yogyakarta	83,98	16,02	100,00
Jawa Timur	84,43	15,57	100,00
Jawa Tengah	84,95	15,05	100,00
Bali	86,03	13,97	100,00
Sulawesi Utara	86,30	13,70	100,00
Sulawesi Selatan	88,03	11,97	100,00
Jawa Barat	88,79	11,21	100,00
Lampung	88,93	11,07	100,00
Kalimantan Selatan	89,19	10,81	100,00
Bengkulu	89,49	10,51	100,00
Sumatera Barat	89,54	10,46	100,00
Gorontalo	89,55	10,45	100,00
Jambi	89,77	10,23	100,00
Nusa Tenggara Barat	89,80	10,20	100,00
DKI Jakarta	89,82	10,18	100,00
Kep. Bangka Belitung	89,82	10,18	100,00
Banten	89,89	10,11	100,00
Nusa Tenggara Timur	89,94	10,06	100,00
Sumatera Selatan	88,03	9,92	100,00
Sumatera Utara	86,30	9,75	100,00
Kalimantan Barat	90,33	9,67	100,00
Sulawesi Tengah	88,03	9,63	100,00
Maluku	90,48	9,52	100,00
Kalimantan Timur	90,91	9,09	100,00
Kalimantan Utara	91,01	8,99	100,00
Aceh	91,24	8,76	100,00
Kalimantan Tengah	91,26	8,74	100,00
Sulawesi Tenggara	91,28	8,72	100,00
Maluku Utara	91,36	8,64	100,00
Sulawesi Barat	91,45	8,55	100,00
Riau	92,60	7,40	100,00
Kepulauan Riau	93,46	6,54	100,00
Papua Barat	93,51	6,49	100,00
Papua	93,80	6,20	100,00

*Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2024*

Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa di tahun 2023 terdapat delapan provinsi di Indonesia dengan persentase penduduk lansia telah melebihi 11%. Peningkatan jumlah penduduk lansia di berbagai provinsi tersebut membawa tantangan tersendiri, baik dalam hal penyediaan layanan kesehatan, fasilitas sosial,

maupun kebijakan dalam mendukung kesejahteraan lansia. Oleh karena itu, pemerintah bersama pihak terkait perlu merancang kebijakan dan program jangka panjang guna mengantisipasi kebutuhan lansia yang terus berkembang, agar lansia dapat menjalani masa tuanya secara sehat, mandiri, produktif, serta sejahtera (Hidayati et al. 2025). Lebih lanjut, mengacu pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola, mengendalikan, serta memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penduduk melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan keluarga.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021, sebagai regulasi nasional tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan menjadi landasan kebijakan sebagai upaya perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan lansia secara terpadu. Regulasi ini mewujudkan pemerintah pusat maupun daerah dalam meningkatkan kualitas hidup lansia melalui program yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menerjemahkannya dalam program Bangga Kencana melalui pendirian kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL), (Yuswantina, Vifta, and Susilo 2019), yang diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan keluarga lansia serta pra-lansia sehingga kualitas hidup dapat meningkat sesuai dengan Peraturan BKKBN Nomor 13 Tahun 2019. Sebagai inovasi pelaksanaan kebijakan, BKL menghadirkan Program Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) sebagai sarana edukatif nonformal dalam mewujudkan lansia SMART sehingga selaras dengan arah regulasi nasional kelanjutusiaan.

Selantang dihadirkan sebagai implementasi nyata dari konsep pendidikan non formal, dengan konsep yang diusung adalah pendidikan sepanjang hayat (*Long Life Education*) bagi para lansia (Susanti et al. 2025). Implementasi kebijakan Selantang ini di dasari oleh Keputusan Deputi Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Dengan Nomor : 15/KEP.KSPK/F3/2024 Tentang Petunjuk Teknis

Penyelenggaraan Sekolah Lansia Di Kelompok Bina Keluarga Lansia. Adapun tujuan program Selantang yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kegiatan kelompok BKL dalam mewujudkan Lansia Tangguh
2. Meningkatkan pemahaman Lansia tentang konsep SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif dan Bermartabat) dalam lingkup 7 Dimensi Lansia Tangguh (spiritual, fisik, emosional, intelektual, sosial, profesional vokasional dan lingkungan)
3. Meningkatkan pengetahuan lansia tentang proses menua sehat dan sakit
4. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku lansia tentang kesehatan fisik dan mental
5. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku lansia tentang kehidupan sosial dan ekonomi
6. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku lansia tentang lingkungan yang mendukung kehidupan lansia.

Tahun 2022, Provinsi Jawa Timur menjadi pionir dalam pelaksanaan program Selantang. Hal tersebut didukung dengan posisi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk lansia terbanyak kedua di Indonesia, yaitu sekitar 5,76 juta jiwa. Program Selantang diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mendukung kebutuhan serta meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat lansia di Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan program ini dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pembentukan, persiapan, hingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran bagi lansia.

Kurikulum program Selantang pada Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) disusun secara bertahap melalui tiga standar pembelajaran. Setiap standar memiliki tujuan dan fokus capaian yang berbeda, mulai dari pengembangan kemandirian individu, peningkatan peran dalam keluarga, hingga kontribusi pada komunitas. Penyusunan jenjang kurikulum ini memungkinkan peserta mengikuti proses pembelajaran yang progresif sesuai kemampuan dan kebutuhan. Tabel berikut merangkum jenjang kurikulum beserta tujuan, fokus capaian, dan catatan penting terkait pelaksanaan setiap standar:

**Tabel 1. 2 Standar Sekolah Lansia Tangguh (Selantang)**

<b>Standar</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Fokus Pencapaian</b>	<b>Catatan Penting</b>
<b>Standar 1</b>	Membentuk lansia yang mandiri, bahagia, dan tangguh bagi diri sendiri	Kemandirian individu, kesejahteraan diri	Pelaksanaan dapat dipengaruhi motivasi peserta dan kondisi fisik masing-masing
<b>Standar 2</b>	Meningkatkan peran lansia dalam keluarga dan mempertahankan ketangguhan	Keterlibatan keluarga, penguatan peran sosial	Dukungan keluarga dan lingkungan berperan penting dalam keberhasilan tahap ini
<b>Standar 3</b>	Membekali lansia agar berkontribusi dalam komunitas sebagai duta lansia	Partisipasi sosial luas, kontribusi komunitas	Kesempatan berperan dalam komunitas dapat berbeda-beda sesuai kondisi lokal dan akses peserta

*Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk, 2024*

Selain jenjang kurikulum, program Selantang juga mencakup pengembangan lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh. Materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan melibatkan tenaga ahli dari organisasi profesi, seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), untuk memastikan kualitas penyampaian materi yang relevan dan sesuai bidangnya. Dengan struktur kurikulum bertahap dan materi yang komprehensif, program Selantang memberikan peluang bagi lansia untuk berkembang secara mandiri, berperan dalam keluarga, dan berkontribusi aktif di masyarakat, sehingga mendukung terciptanya lansia yang tangguh dan berkualitas.

Program Selantang telah dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Untuk mendukung pelaksanaan dan penyebarluasan informasi program bagi lansia, BKKBN mengembangkan website dan aplikasi Golantang, yang menyediakan data dan informasi seputar kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL), termasuk jumlah kelas dan distribusi pelaksanaan program Selantang di seluruh wilayah Indonesia. Melalui Golantang, program ini dapat dimonitor secara digital sehingga memudahkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program di tingkat lokal. Berdasarkan data tersebut, jumlah kelas Selantang di Provinsi Jawa Timur disajikan pada Tabel 1.2.

**Tabel 1. 3 Jumlah Kelas Selantang di Provinsi Jawa Timur**

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Standar/ Kurikulum 1-3	Jumlah Kelas
1.	<b>Jember</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
2.	<b>Nganjuk</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
3.	<b>Madiun</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
4.	<b>Probolinggo</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
5.	<b>Gresik</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
6.	<b>Blitar</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
7.	Lamongan	27	1	10
8.	Magetan	18	1	10
9.	Mojokerto	18	2	10
10.	Kediri	26	1	10
11.	Ngawi	19	1	11
12.	Jombang	21	3	11
13.	Trenggalek	14	1	14
14.	Malang	33	2	15
15.	Pasuruan	24	2	20
16.	Banyuwangi	25	1	28
17.	Surabaya	31	1	29
18.	Bondowoso	23	1	34
<b>Total</b>				<b>225</b>

*Sumber : Website Resmi Golantang BKKN dan Data Diolah Oleh Peneliti, 2024*

Berdasarkan Tabel 1.3, terlihat bahwa terdapat variasi jumlah kelas Selantang di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Beberapa kabupaten, seperti Jember, Nganjuk, Madiun, Probolinggo, Gresik, dan Blitar, memiliki jumlah kelas yang relatif sedikit, yaitu kurang dari 10 kelas per kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program di kabupaten-kabupaten tersebut masih terbatas jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, seperti Bondowoso, Surabaya, dan Banyuwangi, yang memiliki jumlah kelas lebih banyak. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran bahwa persebaran program Selantang di Provinsi Jawa Timur belum merata. Informasi ini menjadi dasar untuk menganalisis implementasi program di tingkat lokal, termasuk evaluasi capaian peserta dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan penyebaran dan efektivitas program di setiap wilayah.

Berdasarkan data persebaran kelas Selantang di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk dipilih sebagai lokus penelitian karena termasuk salah satu dari lima kabupaten/kota dengan jumlah kelas Selantang terendah. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa Nganjuk hanya memiliki 6 kelas aktif dari total 225 kelas yang tersebar di 18 kabupaten/kota, sehingga perluasan program Selantang di wilayah ini berjalan relatif lambat. Menariknya, meskipun jumlah kelas terbatas dan cakupan wilayah masih minim, Kabupaten Nganjuk telah berhasil menerapkan kurikulum hingga Standar 3, jenjang tertinggi dalam pelaksanaan program Selantang. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen tinggi dari peserta lansia dan pelaksana program di tingkat lokal, namun sekaligus memperlihatkan perbedaan yang mencolok antara kuantitas penyebaran program dan kualitas implementasinya. Fenomena ini menjadi dasar pemilihan Kabupaten Nganjuk sebagai lokasi kajian, dengan tujuan untuk menelusuri faktor-faktor yang mendukung keberhasilan hingga Standar 3 sekaligus hambatan yang menyebabkan penyebaran program belum merata di seluruh kecamatan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Nganjuk memiliki peran penting sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program Selantang. Dinas ini tidak hanya bertugas memperkenalkan program, tetapi juga melakukan sosialisasi, pembinaan, dan memberikan arahan kepada para Penyuluh Keluarga Berencana (KB) agar implementasi Selantang di tingkat kecamatan dapat berjalan efektif. Peran strategis ini menjadi sangat relevan ketika melihat kondisi demografis Kecamatan Nganjuk, yang memiliki jumlah lansia mencapai 9.731 jiwa pada tahun 2024. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah Lansia di Kecamatan Nganjuk Periode 2024 :

**Tabel 1. 4 Jumlah Lansia di Kecamatan Nganjuk Periode 2024**

KODE	KELURAHAN	JUMLAH INDIVIDU DALAM KELUARGA	KELOMPOK UMR			
			60 - 64	65 - 69	70 - 74	75+
1001	JATIREJO	5,828	312	223	106	103
1002	PLOSO	4,746	278	180	121	108
1003	PAYAMAN	3,418	203	162	108	97
1004	KRAMAT	6,375	389	286	171	196
1005	GANJUNG KIDUL	2,746	178	151	98	113
1006	WEUNGKOTOK	5,624	314	194	114	112
1007	MANGUDIKARAN	6,881	413	298	163	165
1008	KALMAN	3,741	291	204	162	173
1009	KARTOHARJO	4,546	230	172	11	127
1010	CANGKRIMAN	2,562	140	101	55	56
1011	BOGO	3,096	219	164	95	93
1012	RINGINANOM	1,645	85	66	29	39
1013	BEGADUNG	5,952	316	249	130	141
2014	KEDUNGDOWO	4,200	218	161	92	144
2015	BALONGPACUL	1,721	97	60	50	61
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>63,081</b>	<b>3,683</b>	<b>2,671</b>	<b>1,605</b>	<b>1,772</b>

Sumber : Balai Penyuluhan KB Kecamatan Nganjuk, 2025

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas, jumlah lansia di Kecamatan Nganjuk pada periode 2024 mencapai 63.081 jiwa, tersebar di 15 kelurahan dengan rincian 3.683 lansia usia 60–64 tahun, 2.671 usia 65–69 tahun, 1.605 usia 70–74 tahun, dan 1.772 lansia usia 75 tahun ke atas. Kondisi ini menegaskan urgensi hadirnya Program Selantang sebagai sarana edukatif nonformal yang tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mendorong lansia tetap aktif, mandiri, produktif, dan berperan dalam keluarga maupun masyarakat. Dengan jumlah lansia yang besar dan beragam kebutuhan tersebut, keberadaan program Selantang di Kecamatan Nganjuk menjadi sangat strategis untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan lansia serta memastikan mereka dapat menjalani masa tuanya secara sehat, bahagia, dan tangguh.

Program Selantang pertama kali dilaksanakan pada September 2022 di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, berkat tingginya antusiasme lansia, sebagian besar pensiunan, yang membutuhkan aktivitas positif untuk mengisi waktu luang. Kecamatan Nganjuk dipilih sebagai lokus utama karena menjadi

pionir pelaksanaan program Selantang di kabupaten ini. Keberadaan Koordinator Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) yang tinggal di Kecamatan Nganjuk juga mendorong terbentuknya kelas pertama, karena kader tersebut telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi Selantang dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, sehingga siap menjadi penggerak program di daerahnya. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Agus Tedjo dalam artikel Portal Informasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk (PING) sebagai berikut:

"Untuk pertama kalinya, kegiatan wisuda peserta Program Selantang di Kecamatan Nganjuk berhasil dilaksanakan, dengan Kelurahan Jatirejo sebagai lokasi perdana. Saat ini, program tersebut telah mencapai Strata 3. Syukurlah, perkembangannya semakin terlihat; selain di Jatirejo, Program Selantang juga mulai tumbuh di Kelurahan Begadung dan Kelurahan Keramat. Bahkan, kecamatan lain seperti Jatikalen pun telah memulai penyelenggarannya. Harapannya, Program Selantang dapat terus meluas hingga menjangkau seluruh wilayah Nganjuk," jelasnya. (Sumber : <https://www.nganjukkab.go.id/detail-kabar/wujudkan-lansia-tangguh-dinas-ppkb-kenalkan-program-selantang> di akses pada Selasa 26 November 2024).

Sejak program Selantang mulai dijalankan di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2022 hingga 2024 pelaksanaannya masih terbatas pada 2 dari 20 kecamatan yang ada. Tabel berikut ini menunjukkan jumlah kelas Selantang yang terdapat di Kabupaten Nganjuk:

**Tabel 1. 5 Jumlah Kelas Selantang di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024**

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Bina Keluarga Lansia (BKL)	Jenjang Sekolah			Wisuda Tahun 2024
				S1	S2	S3	
1.	Nganjuk	Keramat	Mustokoweni			37	37
		Begadung	Margo Mukti			30	30
		Mangudikaran	Nur Jannah	44			
		Balongpacul	Sidomukti	29			
2.	Jatikalen	Jatikalen	Lansia Bahagia	32			
		Dlururejo	Sejahtera	35			
<b>Jumlah Total</b>				<b>207</b>			<b>67</b>

*Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk, 2024*

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun jumlah kelas di Kabupaten Nganjuk relatif sedikit, beberapa kelas telah berhasil menerapkan Standar 3, jenjang tertinggi dalam kurikulum Selantang. Kondisi ini menegaskan kontras antara

kuantitas penyebaran program yang masih terbatas dengan kualitas implementasi di beberapa kelas yang sudah mencapai jenjang tertinggi. Fenomena inilah yang menjadi landasan penelitian untuk menelusuri faktor-faktor pendukung keberhasilan hingga Standar 3 sekaligus hambatan yang menghalangi perluasan program di kecamatan lainnya.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa implementasi Program Selantang belum sepenuhnya optimal. Penelitian oleh Dela Ayu Windani dan Weni Rosdiana (2025) di Surabaya, misalnya, menemukan adanya hambatan berupa keterbatasan anggaran, sosialisasi yang belum merata, serta rendahnya komitmen sebagian pelaksana sehingga partisipasi lansia masih rendah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam implementasi Selantang tidak hanya terjadi di Surabaya, tetapi juga relevan dengan kondisi di Kabupaten Nganjuk yang masih menghadapi kendala serupa.

Fenomena implementasi Program Selantang di Kecamatan Nganjuk menunjukkan adanya kontradiksi menarik: jumlah kelas yang terbatas, tetapi sebagian telah berhasil mencapai jenjang Standar 3. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan nasional yang menekankan perlindungan menyeluruh, partisipasi luas, dan keberlanjutan, dengan realitas implementasi yang masih terkendala sosialisasi, sumber daya, serta birokrasi. Gap inilah yang penting untuk ditelusuri lebih lanjut agar pelaksanaan Selantang benar-benar sejalan dengan arah kebijakan nasional. Untuk memahami kondisi ini secara lebih komprehensif, diperlukan kerangka analisis yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat jalannya kebijakan. Teori implementasi kebijakan George C. Edward III menjadi relevan untuk digunakan, karena teori ini menekankan empat variabel penting yang saling berhubungan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Menurut Edward III, komunikasi kebijakan menentukan apakah informasi mengenai tujuan dan mekanisme program dapat tersampaikan secara jelas kepada pelaksana maupun masyarakat sasaran. Dalam konteks di Kabupaten Nganjuk, komunikasi masih menjadi tantangan. Dari total 20 kecamatan, hingga tahun 2024 hanya 2 kecamatan (Nganjuk dan Jatikalen) yang melaksanakan Program Selantang (Dinas PPKB,

2024). Namun, komunikasi di kecamatan pionir cukup efektif. Tingginya partisipasi lansia sebanyak peserta aktif menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas dapat meningkatkan keterlibatan, bahkan menghasilkan capaian sampai Standar 3. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Mirok, salah satu kader Selantang di Kecamatan Nganjuk:

“Sebenarnya kalau komunikasinya sudah jelas mbak, para lansia itu semangat sekali mengikuti...bahkan ada yang lanjut sampai Standar 3.” (Hasil wawancara pendahuluan, 10 Juli 2025).

Edward III juga menegaskan pentingnya sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam keberhasilan implementasi. Hambatan sumber daya diungkapkan oleh Bapak Agus Tedjo, Koordinator Selantang Kecamatan Nganjuk:

“Kalau kendalanya sih salah satunya karena jumlah kader yang sudah dilatih itu masih sangat terbatas mbak, jadi belum bisa menjangkau semua kecamatan. Selain itu juga belum ada alokasi anggaran resmi dari pemerintah, jadi beberapa kecamatan sempat mengeluhkan soal pembiayaan. Padahal sebenarnya respon dari lansia itu bagus, mereka semangat ikut dan antusias. Tapi ya itu tadi, tantangannya ada di keterbatasan sumber daya manusianya.” (Hasil wawancara pendahuluan, 12 September 2024)

Dari kutipan wawancara pendahuluan dengan Bapak Agus Tedjo terlihat bahwa salah satu hambatan utama implementasi Program Selantang di Kecamatan Nganjuk adalah keterbatasan alokasi anggaran. Beliau menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada alokasi resmi dari pemerintah, sehingga kebutuhan biaya program sering kali menjadi kendala di lapangan. Kondisi ini juga sejalan dengan fakta bahwa anggaran yang diperoleh Program Selantang dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masih sangat terbatas, sehingga tidak mampu mencukupi pembiayaan untuk perluasan program dan penyediaan fasilitas pendukung. Kendala birokrasi pun diperkuat oleh Ibu Anne, Penata Bidang Pembangunan Keluarga Dinas PPKB:

“Program Selantang ini sebenarnya sudah mulai dijalankan mbak, tapi sampai sekarang baru ada di dua kecamatan saja dari total 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Pelaksanaannya memang belum menyeluruh karena ada beberapa hambatan seperti, masalah anggaran dan sosialisasi programnya mbak ke tiap-tiap kecamatan. Jadi proses pelaksanaan kurang optimal” (Hasil wawancara pendahuluan, 17 Oktober 2024)

Meski demikian, disposisi atau komitmen kader terbukti menjadi kekuatan utama yang mendorong keberhasilan hingga Standar 3 dengan jumlah 67 peserta wisuda tahun 2024. Dengan demikian, keempat variabel Edward III komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami implementasi Program Selantang di Kecamatan Nganjuk. Teori ini menjelaskan paradoks yang muncul, yaitu meskipun jumlah kelas Selantang di Nganjuk relatif sedikit, beberapa kelas justru mampu mencapai Standar 3 berkat disposisi pelaksana yang tinggi dan komunikasi efektif di tingkat lokal, meski masih terkendala sumber daya dan struktur birokrasi. Hal ini menunjukkan adanya gap penelitian yang penting untuk ditelusuri, karena penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti hambatan teknis tanpa secara mendalam menganalisis faktor implementasi kebijakan melalui perspektif Edward III. Selain itu, mengingat tujuan utama Program Selantang adalah meningkatkan taraf hidup lansia sehingga mereka dapat tetap sehat, mandiri, aktif berperan, dan produktif, maka analisis menggunakan teori Edward III menjadi semakin relevan. Keempat variabel Edward memberikan landasan untuk menilai sejauh mana komunikasi, pemenuhan sumber daya, respons dan kemauan pelaksana, serta sistem birokrasi yang berlaku dapat mendukung tercapainya tujuan program tersebut di Kecamatan Nganjuk. Dengan demikian, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan berjudul **“Implementasi Program Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) di Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada uraian latar belakang dan data pendukung di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat ditetapkan sebagai berikut “Bagaimana Implementasi Program Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) Di Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan menelaah lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan hambatan yang menghalangi pencapaian optimal dalam

pelaksanaan program Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) Di Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk”.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menghasilkan wawasan serta manfaat terkait Implementasi Program Selantang Di Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. Selain itu, Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut, terutama yang berfokus pada Implementasi Program Selantang Di Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai pemenuhan syarat dalam menuntaskan perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Serta diharapkan dapat memperdalam pengetahuan dan pemahaman mengenai Implementasi Program Selantang Di Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.

###### b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai rekomendasi bagi instansi dalam pengimplementasi Program Selantang Di Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.

###### c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi atau literatur di perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan ruang baca Program Studi Administrasi Publik yang nantinya akan menjadi dasar pemikiran penulisan dan kajian sejenis pada penelitian selanjutnya.